



**SIARAN PERS**

NOMOR : HM.00/PENG-06/SU04/3/2024

19 Maret 2024

**Waspada Penipuan Catut Nama BPKP**

Jakarta - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menghimbau kepada masyarakat luas agar berhati-hati terhadap upaya penipuan yang dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab atas penawaran simposium nasional, bimbingan teknis (bimtek), seminar, *workshop*, pelatihan, atau sejenisnya yang mengatasnamakan BPKP.

Akhir-akhir ini modus penipuan berkedok seminar atau pelatihan yang mensyaratkan transfer uang mengatasnamakan BPKP marak terjadi. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat, lembaga pemerintah, dan badan usaha agar lebih berhati-hati dan waspada terhadap undangan yang mengatasnamakan BPKP.

Bila menjumpai informasi serupa, sebaiknya segera mencari referensi yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi valid terkait kegiatan BPKP dapat diakses melalui *website* atau akun media sosial resmi milik BPKP. Masyarakat juga dapat bertanya dan melakukan konfirmasi mengenai kebenaran informasi melalui kontak yang ada di *website* maupun media sosial resmi tersebut.

**Narahubung Media:**

Gunawan Wibisono

Juru Bicara BPKP

M : 0882221224490 // W : [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
SEKRETARIAT UTAMA**

Jakarta, 07 Maret 2024

Nomor : KP.00.01/SIMNAS-6/SU/03/2024  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 6 (Enam) Berkas  
Perihal : **Undangan Simposium Nasional/Bimtek**  
Permohonan dihadiri 5 (lima) peserta

Kepada Yth,-



T e m p a t .-

Dengan Hormat,

Dalam rangka mewujudkan visi jangka panjang Indonesia Maju 2045, yakni Indonesia menjadi Negara maju pada 2045 atau tepat setelah 100 tahun kemerdekaan RI. Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam itu, jika dikelola dengan baik, akan memberikan manfaat besar bagi Bangsa. BPKP berupaya mengoptimalkan dan meningkatkan penerimaan Negara di sektor migas dengan pengaturan yang lebih baik pada industri migas sektor hulu dan hilir. Sektor migas perlu memiliki tata kelola dan manajemen resiko yang handal. Tanpa itu, kegiatan hulu migas tidak akan efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Padahal, sektor hulu migas masih menjadi salah satu sumber penerimaan Negara dan penggerak ekonomi pembangunan nasional yang signifikan. BPKP sebagai pengawas eksternal dapat melakukan *diagnostic assessment* terhadap sistem pengendalian internal. Hasilnya, hasil diagnosa tersebut dapat mendefinisikan area-area yang perlu diperbaiki ke depan yang sangat krusial. BPKP dapat melakukan pemeriksaan terhadap badan usaha dalam rangka menguji ketepatan atas pemenuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kewajiban iuran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemilihan Badan Usaha yang akan dilakukan pemeriksaan berdasarkan beberapa kategori. Pertama, Badan Usaha dengan nilai *outstanding* piutang yang besar. Kemudian, Badan Usaha yang kurang patuh dalam memenuhi data pendukung untuk kepatuhan verifikasi dan rekonsiliasi iuran. Hal ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan koordinasi, supervisi, dan pencegahan dengan kerja sama antara KPK RI dan BPKP. Sektor minyak dan gas bumi (migas) merupakan salah satu sektor industri strategis yang dianggap rentan terhadap kasus korupsi. Bahkan, menurut sektor migas menempati urutan ketiga dengan persentase kasus suap terbesar. Industri energi sebagai sumber daya alam atau ekstraktif seperti minyak dan gas bumi adalah industri terkorup di dunia. Sebagai industri yang sangat strategis, aturan berbisnis migas di Indonesia dapat dikatakan *highly regulated* dibandingkan industri lain, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan terbukanya celah korupsi.

Hal tersebut didukung oleh karakter dari industri migas yang padat modal (*capital intensive*), sehingga nilai perputaran uang di sektor ini sangat tinggi. Rantai bisnis migas yang panjang, mulai dari hulu ke hilir, membutuhkan dukungan infrastruktur yang besar, serta melibatkan aktor dan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan KKKS, baik yang merupakan BUMN, swasta nasional, maupun perusahaan multi nasional, termasuk juga pelaku dari bisnis di rantai penunjang hulu migas seperti dalam penyediaan transportasi, pipa, konsultan bisnis, katering, perbankan, dan sebagainya. Untuk melihat potensi korupsi di sektor migas, dapat dilakukan penelusuran melalui rantai bisnis dan proses di industri tersebut (*extractive bussines chain*). Secara garis besar, ada dua pihak utama dalam setiap industri, yaitu pemerintah dan swasta. Oleh karena itu, korupsi sangat ditentukan oleh adanya faktor permintaan dan penawaran, sehingga desain institusi, serta regulasi turunannya sangat menentukan ada tidaknya celah korupsi. BPKP dan KPK merupakan lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. BPKP dan KPK turut masuk ke sumber daya alam (SDA) untuk mendorong perbaikan sistem pengelolaan SDA. Kasus korupsi yang terkait SDA biasanya melibatkan berbagai tingkat penyelenggara Negara dan pihak swasta. Adapun modus yang digunakan antara lain suap, memperkaya diri sendiri dan orang lain, *conflict of interest*, serta *bad governance*. BPKP mengajak untuk bersama-sama mencegah terjadinya korupsi dengan cara bersikap terbuka. Saat ini, telah dibentuk koordinasi supervisi (korsup) SDA yang bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat.



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
SEKRETARIAT UTAMA**

**B. Tema *Simposium* / Bimtek**

Dalam *Simposium* Nasional/Bimtek dua hari ini dengan mengambil tema “**Optimalisasi Peran BPKP Sebagai Lembaga Strategis Dalam Pengawasan Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi, Serta Tantangan Regulasi, Kebijakan di Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi di Era Dekarbonisasi Implikasi Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perpres Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Inpres Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional, serta Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pengusahaan Pada Kegiatan Usaha di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral**”, yang diadakan oleh Sekretariat Utama BPKP c.q Pusdiklatwas bekerjasama dengan Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (ACLC) KPK, serta *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, dengan tujuan mewujudkan sinergitas dan pengawasan dalam mencapai tujuan negara, khususnya di bidang minyak dan gas bumi.

**C. Waktu dan Tempat**

Adapun acara tersebut diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu s.d Kamis, 03 – 04 April 2024

Jam : 08.00 – 13.15 / 08.00 – 13.25 WIB (selesai)

Tempat : **Hotel Mulia Senayan (The Grand Ballroom)**

Jl. Asia Afrika Senayan, Jakarta Pusat 10270

Agenda : Terlampir

*Dress Code* : Pakaian formal dan wanita menyempit

**D. Peserta dan Biaya**

Demi sukseskan kegiatan ini, setiap peserta *Simposium* Nasional/Bimtek membayar kontribusi sebesar **Rp7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**. Biaya tersebut sudah termasuk ruang *meeting*, perlengkapan *simposium*, narasumber, dokumentasi kegiatan, dan materi.

Kontribusi kegiatan dapat ditransfer ke rekening **Bank Rakyat Indonesia (BRI) No: 7292-01-041752-50-6 Bendahara Panitia Pusdiklatwas – ACFE dan Vici Nurlaela Muchammad SE, Kantor Cabang Bekasi**. Panitia tidak melayani penerimaan pembayaran kontribusi peserta di tempat registrasi dan pengisian daftar hadir/absensi peserta. Sesuai yang telah disepakainya, pembayaran hanya dapat dilakukan dengan sistem transaksi non-tunai.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi : **Sekretariat Utama – Pusdiklatwas**

Widodo Eko Prasetyo, SE, M.Ak HP 0811185587

Maharam Oktavia, Ak, MH, CFE HP 0811115565 / 0811233737 (Whatsapp)

Kharisma Haidar Hanif, Ak, MBA, CGCAE HP 08111504566

Biro SDM dan Humas Fax. 021 – 8566927 / 0251 - 7546465

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak, MB**  
19661124 198703 1 001



**Dr. Ernadi Sudarmanto, Ak, MM, M.Ak**  
1965-704 198503 1 001



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
SEKRETARIAT UTAMA**

**JADWAL SIMPOSIUM NASIONAL/BIMTEK PUSDIKLATWAS - ACFE**

**Sesi-1 Rabu, 03 April 2024  
Hotel Mulia Senayan, The Grand Ballroom  
Jl. Asia Afrika Senayan, Jakarta Pusat 10270**

**TEMA : “Optimalisasi Peran BPKP Sebagai Lembaga Strategis Dalam Pengawasan Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi, Serta Tantangan Regulasi, Kebijakan di Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi di Era Dekarbonisasi Implikasi Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perpres Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Inpres Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional”**

Waktu	Kegiatan	Person in Charge (PIC)	Tempat
08.00 – 09.00	Registrasi Peserta	Tim Pendaftaran	Hotel Mulia Senayan The Grand Ballroom
09.00 – 09.15	Pembukaan <i>Simposium</i> /Bimtek	MC	
	Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	Ditunjuk	
	Pembacaan Doa	Pembaca Doa	
09.15 – 09.25	Laporan Sekretaris Utama BPKP	<b>Dr. Madhi Sudarmanto, Ak, MM</b>	
09.25 – 09.40	<i>Keynote Speech</i> dan Pembuka <i>Simposium</i>	Menteri ESDM <b>Ir. Arifin Tasrif</b>	
09.40 – 09.55	<b>B R E A K</b>		
09.55 – 12.45	Diskusi Panel 1. Perspektif Memberikan Keuntungan Untuk Kemashlahatan Masyarakat Indonesia RUU Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi: <b>Dr. H. Rachmad Sobri, S.H.</b> (Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bidang Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan Korinbang) 2. Perspektif Industri Upaya Ketahanan Energi Nasional Melalui Aktivitas Eksplorasi dan Pengembangan Serta Mendorong Investasi Untuk Mendukung Transisi Energi Peraturan BPKM No. 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko : <b>Bahliil Lahadalia, SE</b> (Menteri Investasi/ Kepala BPKM ) 3. Perspektif Koordinasi dan Percepatan Penyelesaian Permasalahan Yang Menghambat Upaya Peningkatan, Optimalisasi dan Percepatan Produksi Minyak Bumi Nasional Inpres No. 2 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Produksi Minyak Nasional : <b>Jodi Mahardi, B.sc MLA</b> (Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves RI) 4. Perspektif Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : <b>Dr. Nurul Ghufron, SH, MH</b> (Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi)	Moderator: Pengamat Minyak dan Gas Bumi <b>Ir. Daendarlianto, ST, M.Eng</b>	
12.45 – 13.15	Diskusi dan Tanya Jawab		
13.15	Selesai		



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
SEKRETARIAT UTAMA**

**JADWAL SIMPOSIUM NASIONAL/BIMTEK KERJASAMA PUSDIKLATWAS – ACFE**

**Sesi-2 Kamis, 04 April 2024  
Hotel Mulia Senayan, The Grand Ballroom  
Jl. Asia Afrika Senayan, Jakarta Pusat 10270**

**TEMA : “Optimalisasi Peran BPKP Sebagai Lembaga Strategis Dalam Pengawasan Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi, Serta Tantangan Regulasi, Kebijakan di Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi di Era Dekarbonisasi Implikasi Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perpres Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Inpres Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional”**

Waktu	Kegiatan	Peserta / In Charge (PIC)	Tempat
08.00 – 09.00	Penerimaan Peserta	Tim Penyelenggara	Hotel Mulia Senayan, The Grand Ballroom
09.00 – 09.15	Pembukaan <i>Simposium/Bimtek</i>		
	Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	Dirjen Migas	
	Pembacaan Doa	Perwakilan Doa	
09.15 – 09.25	Laporan Sekretaris Utama BPKP	<b>Ernadhi Sudarmanto, Ak, MM</b>	
09.25 – 09.40	<i>Keynote Speech</i> dan Pembuka <i>Simposium</i>	Kepala BPKP <b>Dr. M. Yusuf Ateh, Ak, MBA, CSFA</b>	
09.40 – 09.55	<b>B R E A K</b>		
09.55 – 12.00	Diskusi Panel 1. Perspektif Penyelenggaraan, Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Kegiatan Minyak dan Gas Bumi Pemerintah ESD No.42 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pengusahaan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak, Energi dan SDM: <b>Ir. Arifin Tjandjaja, M.Eng, SDM RI</b> 2. Perspektif Perpres No. 23 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi: <b>Hageng Suryo Nugroho</b> (Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden) 3. Perspektif Permendag No. 21 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain : <b>Dr. Budi Santoso, M.Si</b> (Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI) 4. Perspektif PP No. 55 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Hulu Migas: <b>Prof. Dr. Khomsiyah, Ak, CA</b> (Guru Besar Hukum Pertambangan Universitas Trisakti)	Moderator: Pengamat Minyak dan Gas Bumi <b>Ir. Daendarlianto, ST, M.Eng</b>	
12.00 – 12.25	<b>B R E A K</b>		
12.25 – 13.10	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator	
13.10 – 13.25	Kesimpulan		
	Penutupan	Pihak Pusdiklatwas – ACFE	
13.25	Pemberian Sertifikat	Pihak Pusdiklatwas – ACFE	

Catatan: Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan (tentatif)  
Penyelenggaraan *simposium* nasional/*bimtek* mengacu pada aturan dan perundang-undangan .

Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120, Tel. (021) 8199341 (hunting) Fax. (021) 8566927  
Web://www.bpkpri.go.id.



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENGAWASAN**

Jalan Beringin II, Pandansari, Ciawi, Kab. Bogor 16720  
Telepon (0251) 8336120 Fax. (0251) 7546465  
web: <http://pusdiklatwas.bpkpri.go.id>

**KWITANSI  
RECEIPT**

**No.** \_\_\_\_\_ : S-715/DL/3/2024  
*Number*

**Telah terima dari** : \_\_\_\_\_  
*Received From*

**Sejumlah uang** : \_\_\_\_\_  
*Amount received*

**Untuk pembayaran:** ( ) Peserta *Simposium Nasional/Bimtek* dengan biaya kontribusi  
*In payment of* setiap peserta Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada hari  
Rabu s.d Kamis Tanggal 03 – 04 April 2024 di Hotel *Grand Ballroom* Jakarta  
(The Grand Ballroom) Tema “Optimalisasi Peran BPKP Sebagai Lembaga  
Strategis Dalam Pengawasan Hilir Minyak dan Gas Bumi, Serta Tantangan  
Regulasi, Kebijakan Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi di Era Dekarbonisasi  
Implikasi Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-  
Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang  
Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
Perpres Nomor 36 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan  
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.”

**Jumlah Rp.** \_\_\_\_\_

- Catatan :
- Kontribusi peserta kegiatan ditransfer ke rekening :  
Bank BRI Kantor Cabang Bekasi  
A/C 7292-01-041752-50-6  
a.n Vici Nurlaela Muchammad SE  
Bendahara Panitia Pusklatwas – ACFE
  - Konfirmasi pembayaran dapat dilakukan melalui whatsapp/email



**Sri Dewi Gayatri, SE, MPA**  
Kepala Subbagian Keuangan



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENGAWASAN**

Jalan Beringin II, Pandansari, Ciawi, Kab. Bogor 16720  
Telepon (0251) 8336120 Fax. (0251) 7546465  
web: <http://pusdiklatwas.bpkpri.go.id>

**FORMULIR PENDAFTARAN *SIMPOSIUM* NASIONAL/BIMTEK**

**“Optimalisasi Peran BPKP Sebagai Lembaga Strategis Dalam Pengawasan Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi,  
Serta Tantangan Regulasi, Kebijakan di Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi di Era Dekarbonisasi”**

**03 – 04 April 2024**

Nama	:	
NIP	:	
Perusahaan	:	
Jabatan	:	
Alamat Kantor	:	
No Telp/HP/Fax	:	
Alamat Email	:	

Dengan ini menyatakan **BERSEDIA** untuk menjadi peserta *Simposium* Nasional/Bimtek dua hari kerjasama Pusdiklatwas – ACFE

.....2024

Peserta,

.....

1. Pendaftaran peserta dan konfirmasi pembayaran paling lambat hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sebelum pelaksanaan kegiatan *simposium* nasional/bimtek.
2. Formulir pendaftaran dan bukti pembayaran biaya peserta diharapkan dapat dikirim melalui whatsapp/email untuk diverifikasi dan terdaftar dalam penetapan peserta.
3. Panitia tidak melayani dan menerima peserta *simposium*/bimtek yang datang ke gedung tanpa melalui mekanisme dan tidak terdaftar dalam penetapan peserta.
4. Dokumen surat *Invoice*/kwitansi asli bercap dan bermaterai diserahkan panitia bendahara di tempat registrasi peserta.

Untuk keterangan dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

Panitia *Simposium* Nasional / Bimtek

**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENGAWASAN**

Jalan Beringin II, Pandansari, Ciawi, Kab. Bogor 16720

Telepon (0251) 8336120 Faksimili (0251) 7546465.

Email: [pusdiklatwas.bpkpri@gmail.com](mailto:pusdiklatwas.bpkpri@gmail.com)

Widodo Eko Prasetyo, SE, M.Ak HP 0811185587

Maharani Oktavia, Ak, MH, CFE HP 0811115565 / 0811233737 (Whatsapp)

Kharisma Haidar Hanif, Ak, MBA, CGCAE HP 08111504566

